



RAMALAN BASIS LKPP /LKPD PEMERINTAHAN

Pendapat Dr Jan Hoesada, anggota KSAP

1. Poses Akuntansi Digital

Pemerintah memilih opsi perlakuan akuntansi yang tersedia pada tiap PSAP berlaku-efektif, untuk keperluan penyajian LKPP/LKPD sesuai kebutuhan Kabinet, dituangkan pada Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintahan 2025/2026.

Dalam khasanah sistem-informasi akuntansi, proses akuntansi berbasis nilai-wajar dan/atau nilai-historis entitas LK-keperintahan terdiri atas penyediaan bahan/input layak proses berbasis AI, sistem entri-data dan proses akuntansi berbasis sistem-pengkodean AI yang menghasilkan buku-jurnal, buku-besar, buku sub-buku-besar terkonfirmasi sesuai tiap nomor PSAP yang sedang berlaku, yang bermuara pada *trial-balance* LK berbasis sistem kendali-internal (*Internal Control over financial reporting*) secara realtime, bermuara pada sistem distribusi informasi-akuntansi yang (1) sebagian bersifat otomatis berkala dan/atau *realtime*, (2) sebagian lain yang bertingkat-tinggi dan rahasia berbasis instruksi pimpinan, ditutup /dipayungi oleh sistem-pengendalian keseluruhan akuntansi sebuah entitas termasuk sistem GCG Akuntansi, sistem peremajaan berkala & otomatis fitur-sistem dan *pass-word*, berbagai serum agar sistem kebal- virus, penyusup, terorist, pencuri, dan perusak data-akuntansi.

Tugas pimpinan akuntansi setiap K/L dan Pemda adalah mengelompokkan jenis transaksi *online*, transaksi *off line* dan campuran keduanya. Bagi negara berkembang, sarana *off-line* untuk peng-inputan lebih banyak terjadi karena infrastruktur negara dan sistem-perekonomian belum berbasis AI, sehingga dibutuhkan karyawan-akuntansi/keuangan pemerintahan sebagai peng-identifikasi input-data layak-proses, konversi data-eksternal menjadi data-praproses-keuangan layak-bayar dan pra-proses akuntansi yang lebih seragam dan aman-kekeliruan. Setiap K/L dan Pemda menghimbau , memberi petunjuk dan mengajar para-pemasoknya agar transaksi *off-line* ber-frekuensi banyak/sering/rutin , agar di upayakan menjadi transaksi *on-line*, agar dapat langsung masuk buku jurnal dan berbagai catatan akuntansi-lain di pemerintahan, misalnya dengan menyediakan *PO online* nan-baku oleh pemasok bagi pembeli.

Pada era AI, penjurnalan dan pemostingan sebaiknya berbasis *realtime*, baik *on-line* maupun *off-line* transaction, tak menggunakan sistem-tunda dan pembukuan-berkala (*periodic-processing, batch-processing*) kecuali beberapa transaksi terpilih seperti imbalan kerja , belanja-sosial tertentu dan belanja-bencana. Sebagian akuntansi *Off-line transaction* mungkin dapat dipermudah dengan sarana OCR (pemindai optik).

Sistem arsip akuntansi dengan demikian mencakupi rumpun (1) berbagai ragam arsip- induk per-nama produk utama/jasa utama tiap K/L/Pemda yang di-peroleh/ diserahkan, daftar pelanggan/pemasok dll, daftar perjanjian pembelian dan penyerahan bantuan/sosial (2)



berbagai arsip-transaksi, terkait tiap-tahap peristiwa perolehan-pembelian dan penyerahan produk/jasa utama K/L/pemda, (3) Berbagai arsip-sejarah atau riwayat setiap perjanjian/komitmen sampai penyelesaiannya, dan (4) berbagai arsip referensi, seperti formula, back-order , backlog, masa-garansi , penalti / ganti-rugi , dan pemutusan-kontrak pengadaan & distribusi pemerintah.

2. Akuntansi Akruar berbasis campuran ANW dan ANH nan-pro ANH.

LK pemerintahan versi SAP 2026 berbasis ANW dan ANH berkomponen

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis ANH sebagai komponen utama LK yang digunakan Kabinet & DPR.
- Pada era Neraca berbasis SAP Nilai-Wajar 2026 berbasis tiap nomor PSAP, apakah PSAP tersebut (1) beropsi tunggal , hanya ANW, (2) beropsi ganda boleh pilih ANW atau ANH, dan (3) beropsi tunggal hanya ANH karena opsi-ANW versi IPSAS tak diadopsi SAP NKRI.

Spekulasi penulis sbb :

- Bagi PSAP ber-opsi tunggal , hanya ANW.
 - a. Walau PSAP investasi surat-berharga mengadopsi mazhab ANW , kebijakan investasi surat-berharga pemerintah NKRI terbatas kebijakan tak-boleh untuk spekulasi (for trading) atau untuk ambil-untung (available for sales) , sehingga semua instrumen investasi terpaksa di catat berbasis ANH (setara held to maturity).
 - b. PSAP persediaan berbasis opsi *cost or market whichever is lower* , pada kenyataannya membuka lebar pilihan cost (atau ANH) karena harga-pasar bebas/aktif bursa/pasar komoditas persediaan diseluruh pulau-pulau dalam negara yang seluas Eropa ini, praktis tidak-tersedia dan/atau tidak-dapat diakses oleh pelaku akuntansi-kepemerintahan (azas kepraktisan atau *expediency* berakuntansi).
Kebijakan sistem akuntansi terpilih cq aplikasi/penerapan PSAP persediaan dengan pilihan ANH selaras LRA berbasis historis.
- Bagi PSAP beropsi ganda boleh pilih ANW atau ANH.
 - c. PSAP Investasi properti, PSAP Agrikultur, PSAP ventura-bersama pada KPBU , PSAP ATB diramalkan yang mempunyai kebijakan sistem-akuntansi ANH karena diselaraskan dengan PSAP AT yang beropsi tunggal (hanya ANH).
- PSAP beropsi tunggal hanya ANH karena opsi-ANW versi IPSAS tak diadopsi dalam PSAP NKRI tersebut.
 - d. PSAP AT beropsi tunggal hanya ANH, karena tidak ada informasi harga-pasar aktif untuk AT pemerintahan berlaku di seluruh kepulauan NKRI.
- PSAP di tunda penerbitannya.
 - e. Terdapat bakalan PSAP Imbalan Kerja Berimbangan Pasti yang belum di proses menjadi PSAP baru.

- Diramalkan dan belum tentu benar; Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Terpilih untuk LKPP tahun 2025/2026 dstnya adalah kebijakan berbasis ANH, sehingga Neraca dalam LKPP ber-hakikat berbasis ANH , selaras Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis ANH, berakibat Laporan Surplus/Defisit dan Laporan Perubahan Ekuitas juga praktis berbasis ANH.

3. Kesimpulan.

Sesuai kebutuhan pemerintahan NKRI,walau kerangka-dasar SAP dan setiap PSAP telah diganti IPSAS edisi mutahir, LKPP dan LK Pemda di masa-depan diramalkan tetap disusun berbasis dasar akrual nan pro ANH.

PP 71/2010 Akuntansi Akrual dapat diganti PP baru 2026 Akuntansi Berbasis IPSAS.

Opini tersebut di atas bersifat pribadi dari penulis, bukan pendapat KSAP.

Jakarta September 2025.